

MUSIK SEBAGAI METODE KRITIK SOSIAL-POLITIK

(Analisis Perlawanan dalam Tiga Lagu Iwan Fals pada Masa Orde Baru)

Zalsa Pramudya Wiyanti

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang

Kode Pos 50275, Telepon/Faksimile (024)7465407

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

The phenomenon of Iwan Fals' protest music as symbolic resistance and part of the new social movement is intriguing to explore. During the New Order era, restrictions on criticism, such as media censorship, limitations on student activities via NKK/BKK, and gathering bans, reduced the space for civil society to voice opposition to the government. Iwan Fals, a mainstream musician, actively criticized the regime through protest songs like "Tikus-Tikus Kantor" and "Ambulans Zig-Zag." His songs, such as "Suara Buat Wakil Rakyat," were often used during demonstrations. Iwan Fals faced censorship from the regime for being perceived as "dangerous." This research aims to analyze how these three songs represent symbolic resistance and whether they fit into the framework of a new social movement. The study employs descriptive qualitative methods and Roland Barthes' semiotic analysis to decode the meaning within these songs. Theories applied include Scott's (1976) concept of symbolic resistance and Pichardo's (1997) and Singh's (2001) theories of new social movements. Data were collected through interviews with music experts and lecturers, alongside literature review. The findings indicate that "Tikus-Tikus Kantor," "Ambulans Zig-Zag," and "Suara Buat Wakil Rakyat" symbolize resistance against corruption, social inequality, and the ineffectiveness of the DPR. However, these songs do not qualify as part of the new social movement due to the absence of collective action. Future studies are encouraged to investigate further

Keywords: Protest Music, Iwan Fals, Symbolic Resistance, New Social Movement

PENDAHULUAN

Kekuasaan merupakan hak yang fundamental dalam politik dan pemerintahan, Weber (1978) menjelaskan konsep kekuasaan sebagai kemampuan memaksakan kehendak terhadap seseorang meskipun orang tersebut menolak. Dahl (1957) menambahkan bahwa kekuasaan didefinisikan sebagai hubungan antara individu dengan lainnya yang diungkapkan dalam notasi simbolik sederhana (simbol matematika yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan

dengan individu atau kelompok). Kekuasaan memungkinkan seseorang untuk menentukan tindakan agar sesuai dengan tujuan pihak pertama (Laswell dan Kaplan dalam Budiardjo, 2008).

Terdapat dua keberjalanan kekuasaan yakni *soft power* dan *hard power*. *Soft power* merupakan bentuk kekuasaan dengan mempengaruhi pihak lain dengan cara mengajak dan menerima nilai-nilai yang dianut (Gray, 2011) seperti budaya, ideologi, dan institusi dan sifatnya tidak terlihat (Nye, 2009). Konsep *hard*

power menerapkan kekuasaan dengan kekuatan militer dan bersifat mengancam (Gray, 2011) serta fokus terhadap kekuatan ekonomi.

Indonesia pernah menerapkan kekuasaan *hard power* pada masa orde baru. Pemerintahan orde baru memberlakukan sistem kemitraan politik dan pembagian peran kolaborasi antara sipil dengan militer untuk mengembalikan tatanan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan diorganisasi secara vertikal dengan ABRI memegang peran penting dalam keberjalanan pemerintahan Orde Baru dalam aspek sosial-politik. Hal tersebut menjadikan kepemimpinan Soeharto tergolong sebagai *repressive-developmental regime* (Feith, 1981). *Repressive developmental regime* adalah negara yang kuat terlibat dalam memfasilitasi pertumbuhan kapitalis yang cepat di antaranya industrialisasi di era korporasi transnasional namun pihak yang berkuasa berusaha memonopoli kekuasaan dan tidak memberikan ruang bagi oposisi atau kekuatan lain yang dapat menantang otoritas mereka. Bentuk ideologi dari rezim tersebut antara lain adalah developmentalis-teknokratis, nasionalistis, dan militeristik.

Malapetaka 15 Januari 1974 menjadi titik balik represifitas orde baru yang ditandai dengan sambutan gerakan penolakan atas kerja sama Jepang saat Perdana Menteri Kakuei Tanaka datang ke Indonesia. Kerjasama ekonomi luar negeri seperti penanaman modal asing menimbulkan pertentangan terutama di kalangan mahasiswa. Masyarakat terutama mahasiswa merasa bahwa program ini hanya akan menambah hutang negara saja. Selain itu, mahasiswa berpendapat bahwa pembangunan yang berlandaskan pada bantuan asing dapat menghasilkan pemerasan negara dan menciptakan ketidakadilan sosial (Jazimah, 2013). Di sisi lain, pemerintah merasa bahwa penanaman modal asing dapat memberikan peluang pekerjaan pada masyarakat Indonesia tanpa mengeluarkan biaya proyek yang besar.

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki kontribusi penting dalam keberjalanan pembangunan ekonomi melalui Repelita I (1969—1974). Jepang melalui Official Development Assistance (ODA) memberikan pinjaman terhadap Indonesia untuk melaksanakan Repelita I sebanyak 10,8 miliar yen untuk menutupi defisit anggaran. Bagi Jepang, Indonesia merupakan sasaran yang vital karena Indonesia merupakan salah satu pemasok *liquid natural gas* terbesar Jepang, sumber daya alam yang kaya, dan upah kerja yang murah. Puncak aksi penolakan investasi Jepang di Indonesia pada 15—16 Januari 1974 menelan korban sebanyak 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, dan 750 orang ditangkap. Akibat peristiwa Malari, terdapat beberapa pemberlakuan baru seperti:

1. Pemerintah orde baru mengeluarkan peraturan tegas seperti adanya pembatasan jam malam di Jakarta 18.00—06.00, penjagaan ketat aktivitas mahasiswa Universitas Indonesia (sebagai basis massa) oleh ABRI (yang kemudian keduanya dicabut pada 21 Januari 1974), penangkapan 45 aksi massa yang dianggap memprovokasi gerakan, dan penutupan beberapa Koran (Nusantara, Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI, Indonesia Raya, Abadi, The Jakarta Times, Pedoman, dan Ekspres) oleh pemerintah karena dianggap melakukan provokasi dan mengganggu ketertiban umum;
2. Pemerintah membatasi kegiatan dewan mahasiswa di dalam kampus dengan mengontrol mahasiswa lewat pimpinan perguruan tinggi (sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemerintah No. 028/1974). Lewat peraturan tersebut, mahasiswa perlu mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan. Pers mahasiswa diawasi oleh Dewan Penerangan dan birokrat kampus. Kegiatan demonstrasi juga dilarang dan jika mahasiswa melakukan aksi demonstrasi akan berhadapan dengan ABRI.

Keberjalanan pasca kejadian Malari membuat rezim orde baru memperketat aturannya terutama dalam ranah kebebasan sipil. Stabilitas nasional perlu dijaga agar keberjalanan pembangunan ekonomi berjalan sebagaimana mestinya. Orde baru menjalankan beberapa cara depolitisasi seperti penerapan massa mengambang (*floating mass*) yang berfungsi untuk menata dan menyederhanakan organisasi sosial-politik dalam melaksanakan pembangunan nasional. Tujuan dibentuknya massa mengambang dilakukan oleh orde baru agar partisipasi masyarakat minim dalam pembangunan politik lokal dengan memberlakukan pelarangan atas pembentukan kepengurusan partai politik sehingga masyarakat menjadi apolitis (acuh terhadap politik) dan tidak terlibat dalam urusan politik (Marpaung, 2012). Selain itu, orde baru memberlakukan penerapan monoloyalitas terhadap Golongan Karya (Golkar) dalam lingkungan pegawai negeri atau pegawai instansi pemerintahan. Proses pelemahan kekuatan, pengaruh, atau kemampuan partai politik juga dilakukan orde baru dengan cara menyederhanakan partai politik dan mengontrol rekrutmen pemilihan ketua umum partai politik (Gaffar, 2006).

Pemerintah orde baru juga memperketat kritik terhadap rezim dan pengetatan terhadap pers. Pers tidak boleh menyiarkan sesuatu yang sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan. Topik pemberitaan tertentu seperti kritik terhadap pemerintahan, keluarga Soeharto, senior militer, dan sebagainya juga tidak dapat dipublikasi secara luas kecuali ada pers yang mengancam (Hill, 1995). Dalam mencegah kritik terhadap pemerintah, diterbitkanlah peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 bahwa setiap penerbitan pers perlu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dari pemerintah (Imron dan Sariyatun, 2016). Pemerintah juga membentuk penembak misterius (*petrus*) dan menghilangkan siapa saja yang mengkritik pemerintah. Petrus atau penembakan misterius mulai ada pada tahun 1983 di Yogyakarta. Petrus digunakan untuk memberantas kriminalitas yang terjadi di kawasan pinggiran kota besar dan sudut kota kecil di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah korban ditembak biasanya terdapat uang sepuluh

ribu rupiah untuk biaya pemakaman yang dibutuhkan (Tempo, 2012).

Oleh karena itu, masyarakat menggunakan media budaya sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap rezim. Perlawanan simbolik merupakan tindakan yang bersifat tidak langsung dan tidak terlihat, yang dapat mencakup sindiran, satire, dan penggunaan metafora dalam karya sastra dan seni. Petani di Malaysia melakukan perlawanan simbolik melalui gosip jahat, pembunuhan karakter, rumor, dan nama panggilan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil (Scott, 1985). Perlawanan simbolik dilakukan karena dirasa dapat mengungkapkan perasaan masyarakat secara langsung karena menentang kekuasaan secara terbuka termasuk tindakan berbahaya (Scott, 1985). Di Indonesia perlawanan simbolik banyak ditemukan pada masa orde baru sebagai respon atas kesewenang-wenangan rezim.

Sastrawan dan musisi di era orde baru seperti W.S. Rendra, Widji Thukul, Rhoma Irama, Bimbo, dan Iwan Fals turut melakukan perlawanan simbolik terhadap pemerintahan orde baru melalui karyanya. Salah satu sastrawan seperti Widji Thukul kerap memperjuangkan persoalan yang dialami oleh orang kecil dan kritik atas represifitas orde baru seperti “Istirahatlah Kata-Kata”, “Kenangan Anak-Anak Seragam”, hingga “Peringatan”. Karyanya tersebut dianggap memiliki kekuatan politik sehingga dianggap berbahaya (Sungkowati, 2005) sehingga beliau diburu oleh pemerintahan orde baru. Karya Rendra dan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) juga dicekal oleh orde baru karena berisikan kritik terhadap pemerintahan orde baru. Hal serupa terjadi pada musisi yang melawan pemerintahan orde baru seperti Iwan Fals, Rhoma Irama, dan Bimbo. Lirik yang ada dalam musik Iwan Fals, Rhoma Irama, dan Bimbo mengandung unsur kritik terhadap rezim dan dianggap berbahaya oleh rezim.

Musik yang digunakan dalam menyuarakan ketidakadilan sering digunakan dalam gerakan sosial disebut dengan musik protes. Menurut Michael Kennedy dan Joyce Bourne Kennedy

(2007), musik protes adalah lagu yang menyuarakan rasa protes tentang ketidakadilan sosial atau politik atau tentang satu peristiwa yang membangkitkan emosi seperti perang Vietnam. Musik protes terbagi menjadi dua kategori yakni musik bernuansa politik dengan mengangkat isu seputar pemerintahan atau musik dengan fokus terhadap ketidakadilan yang dihadapi oleh kelompok marginal (Vox, 2017). Musik protes juga memiliki peran dalam gerakan sosial dengan liriknya yang berisi ketidakpuasan atas ketidakadilan sosial politik. Lagu “We Shall Overcome” dalam gerakan hak sipil di Amerika Serikat misalnya dinyanyikan dalam gerakan dengan tujuan menyatukan demonstran dan memberi semangat juang.

Iwan Fals adalah salah satu musisi yang berpengaruh dalam perkembangan musik protes di Indonesia. Melalui lirik lagu yang eksplisit dan penuh sindiran, Iwan Fals mengkritik pemerintahan orde baru dan kondisi sosial politik saat itu. Beberapa lagunya seperti “Bongkar” dan “Bento” menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan korupsi. Karena keberaniannya dalam menyampaikan kritik melalui lagu, pemerintahan orde baru melarang konser Iwan Fals. Beberapa kali izin penyelenggaraan konser ditolak oleh aparat dengan alasan memicu kerusuhan (Nuri dalam Alexander, 2021). Iwan Fals juga sempat ditahan karena lirik lagu dalam karyanya “Demokrasi Nasi” diduga memojokan salah satu politisi (Nuri dalam Alexander, 2021).

Iwan Fals menyisipkan beberapa karya musik yang menggambarkan fenomena sosial-politik saat itu. Iwan Fals secara gamblang mengkritik pemerintahan orde baru melalui lirik-liriknya yang penuh dengan metafora dan kiasan. Iwan Fals menyampaikan pesan-pesan tentang ketidakadilan, korupsi, dan ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. “Ambulans Zig-Zag” dalam album *Sarjana Muda I* misalnya, menjadi sindiran atas buruknya pelayanan rumah sakit dalam menangani pasien. Salah satu *track* dalam album *Ethiopia*, “Tikus-Tikus Kantor” berisikan sindiran terhadap kinerja pejabat yang buruk dan korup. Album *Wakil Rakyat* juga memuat kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat itu lewat

lagu “Suara Buat Wakil Rakyat” menyoroti realitas kegagalan wakil rakyat sebagai penyambung lidah rakyat. Dengan keberanian Iwan Fals dalam mengangkat tema-tema kontroversial ini, lagu-lagu tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia, tetapi juga menjadi cerminan dari semangat perlawanan terhadap rezim.

Salah satu lagu Iwan Fals seperti “Suara Buat Wakil Rakyat” menjadi alat pembangkit gerakan sosial yang digunakan mahasiswa pada era orde baru di akhir tahun 1990-an untuk melawan korupsi dan kekejaman militer saat itu (Box dan Arronson, 2022). Liriknya menggambarkan situasi bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap sebagai stempel kebijakan Soeharto yang penuh korupsi. Pemilihan kata dalam lagu Iwan Fals yang berani menjadi suara untuk banyak masyarakat Indonesia untuk menyampaikan kritik. Karya Iwan Fals seperti “Bongkar” dan “Bento” menjadi inspirasi mahasiswa di Makassar untuk melakukan gerakan sosial pada masa orde baru (Darmawan, 2020).

Penelitian ini akan menggunakan teori semiotika yang merupakan suatu semiologi dan mempelajari proses manusia (*humanity*) menggunakan sesuatu (*things*) (Sobur, 2009). Roland Barthes membagi tiga bagian analisis teori semiotikanya menjadi denotasi (makna literal atau tertutup), konotasi (interaksi yang terjadi ketika simbol bertemu dengan perasaan pembaca dan nilai dari kebudayaannya atau makna subjektif), dan mitos (tahapan proses kebudayaan menjelaskan beberapa aspek realitas atau gejala alam) (Wibowo, 2011). Selain itu, peneliti akan menggunakan teori perlawanan simbolik James C. Scott (1985) dan teori gerakan sosial baru Pichardo dan Singh dalam Suharko (2006).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dirancang untuk mengeksplorasi unsur-unsur manusia dalam suatu topik tertentu, menggunakan metode

tertentu, dengan meneliti bagaimana suatu individu melihat dan merasakan dunia (Given, 2008). Metode ini memiliki kerangka metodologis untuk mencoba menyelidiki, memahami, dan menganalisis perilaku manusia hingga fenomena di dalam masyarakat (Arnya, dkk., 2023). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dapat menggambarkan suatu peristiwa, gejala, serta kejadian yang terjadi saat ini (Sudjana, 2001). Penggunaan analisis semiotika Roland Barthes untuk menafsirkan lirik lagu dalam musik Iwan Fals yakni “Tikus-Tikus Kantor”, “Ambulans Zig-Zag”, dan “Suara Buat Wakil Rakyat”. Analisis semiotika adalah untuk menafsirkan makna suatu pesan dan mengetahui proses komunikator membangun pesan tertentu (Littlejohn, Foss, dan Oetzel, 2014). Subjek penelitian ini adalah lagu “Tikus-Tikus Kantor”, “Ambulans Zig-Zag”, dan “Suara Buat Wakil Rakyat” dengan data primer observasi menggunakan lirik lagu Iwan Fals, wawancara Iwan Fals di kanal YouTube, dan wawancara dengan akademisi (dosen sastra, dosen komunikasi, dan dosen sejarah) serta pengamat musik dan data sekunder membaca literatur, buku-buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan melakukan wawancara sebagai bentuk verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Semiotika Roland Barthes

Tikus-Tikus Kantor

Iwan Fals menggunakan simbolisme dalam lagu “Tikus-Tikus Kantor” dalam menggambarkan realitas korupsi di Indonesia. Beberapa penggalan lirik lagunya seperti “Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai kotor”, “Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di balik lemari dari baja”, “Tikus tahu sang kucing lapar kasih roti jalan pun lancar”, dan “Memang sial sang tikus teramat pintar atau mungkin si kucing yang kurang ditatar” merupakan representasi normalisasi budaya korupsi dalam pemerintahan Indonesia. Tikus merupakan hewan pengganggu yang membawa kerugian dan kucing merupakan musuh tikus. Tikus dikonotasikan sebagai pejabat korup dan kucing dikonotasikan sebagai

Tim Pemberantas Korupsi (TPK) pada masa orde baru. Sering kali pejabat korup tidak mau mengakui kesalahannya dan berlindung pada teman kerja sendiri dan menggunakan institusinya sebagai perisai. Integritas TPK diragukan karena dalam lirik Tikus tahu sang kucing lapar kasih roti jalan pun lancar” TPK dengan mudahnya dapat disuap oleh pejabat korup agar tindakan korupsinya tidak terbaca. Oleh karena itu dalam lirik “Memang sial sang tikus teramat pintar atau mungkin si kucing yang kurang ditatar”, Iwan Fals mempertanyakan kembali apakah pejabat korup yang “pintar” atau TPK yang kurang berintegritas

Pada masa orde baru, korupsi merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan pemerintahan dan pemangku kebijakan meskipun terdapat lembaga pengawasan korupsi. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) masa orde baru gagal untuk memberantas korupsi dan dianggap tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Terdapat total delapan kasus besar (seperti korupsi Bulog, PN Telekomunikasi, Pertamina, Coopa dan Ciba, Jajaran Pers dan Grafika, CV Waringin, CV Haruman, dan Biro Bangunan Indonesia) dan ratusan kasus korupsi kecil yang ditangani oleh TPK pada awal pembentukan hingga sekitar tahun 1968-an. Delapan kasus korupsi besar tersebut gagal dituntaskan karena harus berhadapan dengan pejabat dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan (Historia, 2018).

Ambulans Zig-Zag

Ambulans Zig-Zag merupakan simbolisme atas kesenjangan pelayanan kesehatan di Indonesia pada masa orde baru. Dalam salah satu cuplikan penampilannya di YouTube, Iwan Fals menjelaskan bahwa lagu “Ambulans Zig-Zag” merupakan simbol dari ambulans yang bergerak secara zig-zag di jalan raya dan lagunya menceritakan tentang kesenjangan pelayanan rumah sakit pada era orde baru (Iwan Fals Musica, 2024). Dalam liriknya, si kaya digambarkan dengan “Di dalam ambulans tersebut tersolek sosok tubuh gemuk bergelimang perhiasan nyonya kaya pingsan mendengar putranya kecelakaan” dan si miskin

digambarkan dengan “Tak lama supir helikopter datang masuk membawa korban yang berkain sarung, seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak”. Kesenjangan pelayanan rumah sakit keduanya digambarkan dalam lirik dengan si kaya “Dan para medis berdatangan kerja cepat lalu langsung membawa korban menuju ruang pemeriksaan. Tanpa bahas sana, bahas sini mungkin sudah terbiasa” dan si miskin dalam beberapa penggalan seperti “Suster cantik datang mau menanyakan dia menanyakan data si korban dijawab dengan jerit kesakitan. Suster menyarankan bayar ongkos pengobatan, *ai* sungguh korban tak bawa uang” dan “Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata “silahkan bapak tunggu di muka”. Terdapat kesenjangan pelayanan rumah sakit dimana si kaya dapat langsung diberikan pelayanan prima meskipun tidak genting sedangkan si miskin perlu menunggu proses pelayanan meskipun keadaannya sangat parah.

Lagu ini merepresentasikan tentang kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dalam pelayanan kesehatan publik. Kesenjangan sosial pada masa orde baru seperti ketimpangan pelayanan publik salah satunya diakibatkan oleh gaya kepemimpinan yang sentralis dan birokratis (Anderson, 1972). Mereka yang memiliki koneksi politik khususnya mendapat layanan kesehatan yang baik dan prima dan sebaliknya. Hal tersebut dicerminkan di dalam penggalan lirik tersebut seperti si miskin harus mengantre karena tidak dapat membayar pengobatan di awal sedangkan si nyonya kaya dapat langsung segera ditindak karena sudah terbiasa masuk rumah sakit.

Suara Buat Wakil Rakyat

Lagu “Suara Buat Wakil Rakyat” merupakan sinisme dan kritik langsung terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan produk nepotisme orde baru dan kinerjanya yang buruk karena tidak merepresentasikan “wakil rakyat”. Penggalan liriknya seperti “Wakil rakyat kumpulan orang

hebat. Bukan kumpulan teman-teman dekat apa lagi sanak famili”, “Saudara dipilih bukan dilotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara *heeh*, juara *ha ha ha*”, “Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat”, dan “Wakil rakyat bukan paduan suara hanya tahu nyanyian lagu setuju”. Lirik yang menyindir anggota DPR pada saat itu merupakan hasil kultural nepotisme orde baru dan terdapat simbol bahwa kinerja anggota DPR hanya sebatas “iya-iya saja” dan tidak berpihak dengan rakyat.

“Suara Buat Wakil Rakyat” merupakan representasi kritik langsung terhadap anggota DPR yang seharusnya menjadi “wakil rakyat” namun tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Anggota DPR pada masa orde baru kurang keterwakilan karena diisi oleh militer dan orang-orang yang loyal dengan Soeharto. Kinerja DPR saat itu hanya bertindak sebatas badan penasehat saja sehingga terdapat gaya kerja “stempel” (Adiputri, 2018). Fenomena tersebut membuat lembaga DPR dikenal sebagai julukan “stempel pemerintahan” (Djiwadono dalam Yuwanto, 2016).

Musik Protes Iwan Fals Sebagai Perlawanan Simbolik pada Masa Orde Baru

Perlawanan simbolik merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan melalui ekspresi budaya sehari-hari. Perlawanan simbolik menentang kekuasaan secara tidak langsung dan mengkritik kekuasaan tanpa harus berhadapan dengan pihak yang berkuasa. Bentuk perlawanan simbolik mencakup tindakan-tindakan simbolik yang dapat mengurangi risiko pembalasan dari pihak yang berkuasa (Scott, 1985) karena cara perlawanannya yang bersifat tidak langsung, ambigu, dan terbentuk dalam perlawanan yang tersembunyi.

Pasca peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 kebebasan sipil semakin direnggut. Sejumlah larangan ditetapkan oleh pemerintahan orde baru

demi menciptakan “stabilitas nasional”. Pergerakan mahasiswa dibekukan dengan penerapan kebijakan NKK/BKK hingga penguatan peran ABRI dalam ranah politik. Penerapan kebijakan tersebut dan penguatan ABRI membuat masyarakat sipil hanya dapat mengawasi peran dan fungsi pemerintahan orde baru secara tidak terbuka (Kurniawan, dkk., 2008). Selain itu, Jenderal Soemitro yang juga menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban menginstruksikan bawahannya untuk “menyelamatkan pemuda-pemudi negeri” yang juga diperkuat oleh instruksi dari Presiden Soeharto untuk “membubarkan perkumpulan remaja di luar lingkungan ABRI”. Instruksi tersebut bertujuan untuk mencegah pengaruh dan hal-hal yang dapat “merugikan” ABRI dan masyarakat sekitar (HistoriA, 2010). Hal tersebut membuat masyarakat tidak dapat menentang pemerintah secara langsung.

Masyarakat sipil pada masa orde baru dapat melakukan perlawanan namun cenderung tertutup dan sembunyi-sembunyi (Kurniawan, dkk., 2008). Hal tersebut menciptakan perlawanan nonformal sebagai salah satu bentuk perlawanan tersembunyi. Perlawanan nonformal lahir atas respon dari pembekuan organisasi formal (Malik, 1998). Organisasi nonformal bertujuan untuk mencairkan ketegangan kondisi psikopolitik (hubungan antara keadaan emosional baik individu maupun kelompok dan kekuasaan politik) pada masa orde baru, beberapa organisasi nonformal di antaranya adalah gosip, rumor, dan desas-desus (Malik, 1998).

Salah satu perlawanan tersembunyi dan dilakukan secara nonformal oleh masyarakat adalah perlawanan budaya. Fenomena perlawanan budaya hadir sebagai salah satu bentuk perlawanan orang muda melalui subkultur untuk melawan hegemoni budaya (Barker, 2000). Kelompok subordinasi akan menggunakan budayanya sendiri untuk melawan keadaan yang menindas (Hechter dalam Martinez, 1997). Perlawanan melalui budaya lahir sebagai salah satu wujud perlawanan simbolik pada masa orde baru. Perlawanan simbolik adalah perlawanan yang dilakukan

secara tidak langsung dan dilakukan melalui budaya sehari-hari (Scott, 1985). Dalam mengungkapkan simbol pada lirik lagu Iwan Fals, kajian budaya diperlukan untuk menunjuk sifat terkonstruksi dari teks budaya (Barker, 2000).

Iwan Fals menggunakan media musik sebagai sarana penyampaian kritiknya. Pada masa orde baru, Iwan Fals melahirkan 27 album baik itu solo maupun bersama band Kantata Takwa dan Swami. Iwan Fals mengangkat berbagai tema seperti ketidakadilan sosial, kritik terhadap pemerintahan, dan sebagainya. Musiknya disebarluaskan secara luas di media saluran penyiaran seperti saluran TV nasional (TVRI) dan beberapa radio sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses lagu Iwan Fals. Selama karirnya pada masa orde baru, Iwan Fals selalu konsisten menyisipkan beberapa lagu bertema kritik sosial atau politik di dalam albumnya. Dalam album *Aku Sayang Kamu* (1986), Iwan Fals Dosen Sastra Indonesia, Khotibul Umam dalam wawancara menguatkan

“*Nah, itu canggihnya Iwan Fals, dia tetap bisa (menyisipkan kritik sosial meskipun dengan lagu cinta) begitu. “Galang Rambu Anarki” itu kan lagu kelahiran anak pertamanya semacam persembahan untuk anaknya yang baru saja lahir, namun juga tetap ada kritik sosial di situ. Itu kan yang membuat lirik-lirik lagu Iwan Fals tuh ketika muncul sangat relevan karena masyarakat relate.*” (Wawancara Khotibul Umam, Dosen Sastra Indonesia FIB Undip, 11 Juli 2024).

Pimpinan Majalah Rolling Stones Indonesia, Adib Hidayat, menguatkan pernyataan tersebut dalam wawancaranya bersama tirto.id “*Sebenarnya dari awal sampai sekarang (pascareformasi), (tema musik) Iwan Fals tetap seimbang, sih. Dia tidak memfokuskan satu album yang khusus ngomongin cinta saja, selalu ada muatan politik, walaupun satu dua lagu*” (Wawancara Adib Hidayat, Pimpinan Majalah Rolling Stones Indonesia, bersama tirto.id, 2022)

Iwan Fals mengkritik orde baru dengan simbol dan perumpamaan lewat lagu-lagu

seperti “Tikus-Tikus Kantor” dan “Ambulans Zig-Zag”. Simbol yang digunakan oleh Iwan Fals di dalam lagu “Tikus-Tikus Kantor” misalnya mengalami pemaknaan ulang sehingga “Tikus-Tikus Kantor” dimaknai sebagai pejabat korup. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bayu Widagdo, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip, bahwa

“Tapi untuk lagu ini (“Tikus-Tikus Kantor”) *kayaknya nggak* menggunakan kalimat sindiran tetapi langsung menunjuk kepada oknum yang disinyalir melakukan praktik-praktik (korupsi) itu”. (Wawancara Bersama Bayu Widagdo, 22 Agustus 2024)

Iwan Fals memberikan pemaknaan simbol “Ambulans Zig-Zag” sebagai kesenjangan sosial dalam pelayanan rumah sakit dengan pemaknaan kembali atas simbol “si kaya” mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat seperti ambulans yang harus diutamakan di jalanan yang macet. Lagu “Surat Buat Wakil Rakyat” berbeda dengan lagu-lagu lainnya karena Iwan Fals mengkritik langsung anggota DPR saat itu. Meskipun begitu, Iwan Fals tetap menggunakan simbolisme berupa sindiran terhadap anggota DPR. Sindiran tersebut merupakan bentuk bahwa wakil rakyat saat itu adalah hasil nepotisme. Lagu tersebut juga dianotasikan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas anggota DPR yang tidak merepresentasikan suara rakyat.

Musik protes Iwan Fals merupakan musik protes yang berpengaruh pada masa orde baru. Musik protes Iwan Fals mudah diterima oleh masyarakat sehingga pesan yang dibawakan tersampaikan. Bahasa yang digunakan Iwan Fals dalam lirik lagunya adalah bahasa Indonesia yang cenderung *nyeleneh* dan bahasanya dekat dengan masyarakat sehingga lagunya dapat diterima di seluruh kalangan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pengamat musik protes yakni Aris Setyawan yakni,

”Iwan Fals pakai bahasa Indonesia (dalam lirik lagunya) dan langsung ngomong, langsung tunjuk (orangnya), misal dalam ‘Tikus-Tikus Kantor’ dia tunjuk langsung (mengkritik pejabat korup), ada wakil rakyat *nggak* beres dia tunjuk langsung, itu yang membuat dia

lebih berpengaruh (dibandingkan musisi-musisi lain).” (Wawancara dengan Aris Setyawan, Musikologis dan Pengamat Musik, 23 Agustus 2024)

Iwan Fals menyampaikan pesan melalui musik protesnya cenderung eksplisit (meskipun menggunakan simbol atau perumpamaan) sehingga masyarakat dapat menangkap isi pesan, sebagaimana yang disampaikan oleh Khotibul Umam, “*Lirik dalam lagu Iwan Fals tergolong cukup eksplisit dalam mengkritik rezim orde baru dibandingkan dengan musisi-musisi lainnya pada masa itu*” (Wawancara Khotibul Umam, Dosen Sastra Indonesia FIB Undip, 11 Juli 2024).

Fenomena musik protes Iwan Fals dapat diidentifikasi sebagai perlawanan simbolik karena menggunakan media sehari-hari melalui budaya yakni musik tanpa harus berhadapan dengan penguasa langsung. Iwan Fals menggunakan musik sebagai media kritik dan perlawanan untuk menyampaikan kritik dan emosinya terhadap rezim orde baru karena rezim kepemimpinan Soeharto tersebut represif dan akan menindas siapa saja yang menyuarakan kritik secara langsung. Sejumlah musik protes Iwan Fals menggunakan simbol perumpamaan sebagai bentuk kritik sosial-politik terhadap pemerintah atau bahkan rezim orde baru itu sendiri dan lainnya berupa simbol sindiran terhadap kondisi sosial dan/atau politik pada masa itu.

Musik Protes Iwan Fals dan Korelasinya terhadap Konsep Gerakan Sosial dan Gerakan Sosial Baru Singh dan Pichardo dalam Suharko (2006)

Gerakan sosial merupakan bentuk aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat dengan catatan terdapat tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektif, dan memelihara politik perlawanan (Tarrow, 1998). Gerakan sosial dibagi menjadi beberapa jenis salah satunya adalah gerakan sosial baru. Terdapat empat parameter karakteristik dalam gerakan sosial baru (GSB) Pichardo (1997) dan Singh (2001) antara lain ideologi yang dibawa adalah nonmaterialistik dengan tujuan untuk melawan dominasi negara dan pasar agar

keadilan tercipta, menggunakan taktik dan pengorganisasian yang mengganggu (*disruptive*) menggunakan organisasi nonformal, strukturnya yang tidak kaku, dan partisipan dan aktor berasal dari berbagai lapisan masyarakat (inklusif).

Musik protes karya Iwan Fals bukan merupakan aksi kolektif masyarakat. Lirik dalam musik protes yang dibuat oleh Iwan Fals merupakan salah satu bentuk perlawanannya terhadap rezim orde baru. Meskipun karya Iwan Fals terdiri dari beragam isu seperti kesenjangan sosial, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh rezim, hingga isu pendidikan dan menggunakan media musik protes sebagai taktik yang mengganggu pemerintah dapat masuk ke dalam karakteristik gerakan sosial baru, musik protes yang diciptakan oleh Iwan Fals dibuat sebagai media kritik Iwan Fals dan penggambaran kondisi orde baru saat itu. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Aris Setyawan, Pengamat Musik Protes, bahwasannya “*Musik (protes) itu adalah media perlawanan yang cukup efektif, tidak dapat mengubah keadaan, tapi setidaknya dia bisa melaporkan bahwa ada fenomena yang tidak adil di sini*” (Wawancara dengan Aris Setyawan, Musikologis dan Pengamat Musik Protes, 23 Agustus 2024).

Meskipun tidak termasuk dalam gerakan sosial baru karena tidak dilakukan secara kolektif, musik protes Iwan Fals dapat membantu memberikan kesadaran, membangun identitas dan menyatukan rasa dalam gerakan sosial baru. Musik secara efektif dapat menggerakkan massa untuk memobilisasi gerakan sosial (The Conversation, 2019). Musik juga dapat menyebarkan pesan dan membangun koneksi pendengarnya (Harvard Political Review, 2023). Musik protes Iwan Fals membantu untuk menginspirasi masyarakat dengan membangun kesadaran kepada pendengarnya. Pada masa orde baru, musik protes digemari terutama di kalangan mahasiswa karena pesan kritik sosial-politiknya terbilang cukup berani. Kesadaran sosial-politik melalui musik protes Iwan Fals akan membuat pendengarnya bergerak sebagaimana pernyataan Yety Rochwulaningsih, Aktivistis Orde Baru dan Dosen Sejarah FIB Undip,

“(Musik protes) paling tidak membangun kesadaran. Kalau sudah membangun kesadaran *kan* otomatis sudah bergerak. Musik itu bisa membangun kesadaran kolektif orang-orang yang mendengarkan itu sehingga membangun kesadaran terus termotivasi. Awalnya dalam situasi pergerakan itu semakin *ngompori, lah*. Semakin berkobar-kobar semangat itu.” (Wawancara dengan Yety Rochwulaningsih, Aktivistis Orde Baru dan Dosen Sejarah FIB Undip, 29 Agustus 2024)

Pada hakikatnya, musik protes dapat menginspirasi pendengarnya untuk melakukan perlawanan, menyatukan rasa, dan membangun identitas gerakan. Musik hiphop dan rap di Amerika Serikat menjadi salah satu bentuk identitas masyarakat kulit hitam dalam menyuarakan kritik tentang kebrutalan politik, rasisme, dan sebagainya (Hodge, 2023). Sama halnya dengan musik Iwan Fals, melalui musik protesnya, musik protes Iwan Fals dapat memberikan semangat gerakan dan membangun identitas gerakan atas keresahan yang sama dalam lirik musik protesnya. Selain itu, musik protesnya juga dapat menginspirasi untuk menggerakkan pendengarnya melalui kesadaran akan pesan yang disampaikan melalui lirik lagu tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Khotibul Umam, Dosen Sastra Indonesia FIB Undip “*Musik dapat menjadi inspirasi pendengarnya*” (Wawancara Khotibul Umam, Dosen FIB Undip, 14 Juli 2024) dan Aris Setyawan, Pengamat Musik Protes,

“Lagu (musik protes) itu hanya dapat mengamplifikasi (gerakan) bisa, melaporkan dan mereportase bisa ... seperti halnya jurnalisisme tapi dalam bentuk karya seni, dalam bentuk musik. tapi juga belum tentu mengubah keadaan kalau tidak dibarengi aksi nyata” (Wawancara dengan Aris Setyawan, Musikologis dan Pengamat Musik, 23 Agustus 2024).

PENUTUP

Simpulan

Studi ini menunjukkan bahwa musik protes Iwan Fals termasuk dalam perlawanan simbolik. Rezim orde baru yang represif membuat masyarakat sipil tidak dapat bergerak secara luas sehingga melahirkan perlawanan terselubung. Perlawanan simbolik merupakan salah satu bentuk perlawanan terselubung yang dilakukan oleh rekan-rekan seniman, salah satunya Iwan Fals, sebagai upaya untuk melawan dan mengkritik rezim orde baru. **Pertama**, Iwan Fals sebagai bagian dari masyarakat yang tertindas menggunakan media musik sebagai bentuk perlawanannya **Kedua**, Iwan Fals menggunakan simbol seperti “tikus kantor” dan “kucing” dalam lagunya sebagai perumpamaan pejabat korup atau koruptor dengan pengawas korupsi serta “ambulans” dan “helicak” sebagai bentuk kesenjangan sosial dalam pelayanan publik rumah sakit. **Ketiga**, Iwan Fals menggunakan bahasa yang cenderung sinis dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Ketiga musik protes Iwan Fals mempunyai andil dalam gerakan sosial baru untuk membangun identitas gerakan, memobilisasi opini, menyatukan rasa, memberikan semangat gerakan, dan menginspirasi gerakan sosial meskipun tidak termasuk dalam gerakan sosial baru. **Pertama**, konsep gerakan sosial baru tidak terlepas dari konsep gerakan sosial. Gerakan sosial adalah aksi kolektif yang dilakukan atas dasar tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektif, dan memelihara politik perlawanan. **Kedua**, musik protes Iwan Fals bukan termasuk aksi kolektif. Iwan Fals menciptakan lagu dengan tema musik protes sebagai bentuk kritiknya terhadap rezim orde baru. Musik protes Iwan Fals memang mengangkat isu-isu nonmaterialistik seperti korupsi, nepotisme, ketidakadilan sosial, dan lainnya serta menggunakan musik sebagai taktik yang mengganggu pemerintah sama halnya seperti beberapa karakteristik gerakan sosial baru yakni mengangkat isu-isu nonmaterialistik dan menggunakan taktik dan

pengorganisasian yang mengganggu (*disruptive*) namun hal tersebut tidak dilakukan secara kolektif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup, objek, dan aktor yang terlibat. Keterbatasan tersebut terkait dengan pemilihan tiga lirik lagu Iwan Fals, yaitu “Tikus-Tikus Kantor,” “Ambulans Zig-Zag,” dan “Suara Buat Wakil Rakyat.” Selain itu, keterbatasan lain muncul karena narasumber utama (Iwan Fals) tidak dapat diwawancarai akibat bentrok dengan jadwal tur konsernya. Meskipun demikian, topik yang diangkat berdasarkan ketiga lagu ini tetap relevan dan memberikan pemahaman terkait tema yang dibahas.

Saran

Berikut merupakan saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Riset ini menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak bermula dari gerakan fisik tetapi dari alam pikiran yang dibangun secara terus menerus yang berasal dari lirik lagu dandjelak akan menjadi modal gerakan sosial untuk melakukan perlawanan terhadap otoritarianisme orde baru.
2. Penelitian mengenai gerakan sosial baru akan memberikan hasil yang lebih komprehensif jika fokus diarahkan pada kajian musisi dan karya-karyanya, atau hubungan antara musisi dengan para penggemarnya.
3. Peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa, seperti musik dan perlawanan simbolik atau gerakan sosial, disarankan untuk mengeksplorasi musisi dan musik protes kontemporer agar studi tetap relevan. Dengan demikian, riset lanjutan dari ketiga subjek ini dapat diperdalam lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anderson, Benedict R. O. (1972). *Javanese Culture and the Problem of National Integration*. New York: Cornell University Press

- Ardaya, Elia, dkk. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Given, Lisa M. (2008). *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research*. Amerika Serikat: SAGE Publications, Inc.
- Barker, Chris. (2008). *Cultural Studies: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gray, Colin S. (2011). *Strategic Studies Institute: Hard Power and Soft Power: The Utility of Military Force as an Instrument of Policy in the 21st Century*. Amerika Serikat. <http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/>
- Hill, David T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
- Kennedy, Michael dan Joyce Bourne Kennedy. (2007). *The Concise Oxford Dictionary of Music*. Oxford: Oxford University Press
- Littlejohn, Stephen W., Karen A. Foss, John G. Oetzel. (2014). *Theories of Human Communication*. Illinois: Waveland Press, Inc.
- Malik, Deddy Djamiludin. (1998). *Gejolak Reformasi Menolak Anarki Konversi Seputar Aksi Mahasiswa Menuntut Reformasi Politik Orde Baru*. Bandung: Penerbit Zaman Wacana Mulia
- Scott, James C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press
- Scott, James C. (1985). *Weapon of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven dan London: Yale University Press
- Singh, Rajendra. (2001). *Social Movements, Old and New, a Post-Modernist Critique*. New Delhi: Sage Publication
- Sobur, Alex. (2009). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tarrow, Sydney. (1998). *Power in Social Movements and Contentious Politics* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press
- Wibowo, 2011. *Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jurnal

- Alexander, Andi dan Shiddiq Sugiono. (2021). "Musik Protes di Indonesia Pada Era Reformasi: Sebuah Kajian Historis". *Jurnal Kajian Seni*. 8(1). hlm. 68
- Box, Kiernan dan Greg Aronson. (2022). "Protest Songs from Indonesia and Australia: A Musicological Comparison". *Journal of Urban Society's Arts*. 9(1). Hlm. 48—59
- Dahl, Robert. (1957). "The Concept of Power". *Behavioral Science*. 2(3). Hlm. 201—215.
- Darmawan, Muhammad Yusran. (2020). "Iwan Fals, Music, and the Voice of Resistance". *I-Pop: International of Indonesian Popular Culture and Communication*. 1(1). Hlm. 41—62
- Jazimah, Ipong. (2013). "Malari: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru". *Jurnal Agastya*. 3(1). Hlm. 9—33
- Imron, dan Tri Yuniarto Sariyatun. (2016). "Pembredelan Pers pada Masa Orde

Baru dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir”. *Jurnal CANDI*. 13(1). Hlm. 143—159

Marpaung, Lintje Anna. (2012). “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)”. *Pranata Hukum*. 7(1). Hlm. 1—14

Martinez, Theresa A. (1997). “Popoular Culture as Oppositional Culture: Rap as Resistance”. *SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES*. 40(2). Hlm. 265—286

Nye, Joseph. (2017). “Soft Power: The Origins and Political Progress of a Concept”. *Palgrave Communication*. Hlm. 1—3

Suharko. (2006). “Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repretoar Gerakan Petani”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 10(1). Hlm. 1—34

Yuwanto. (2016). “Parlemen dan Demokratisasi: Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Transisi Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 2(2). Hlm. 43—50

Skripsi

Rahmadinda, Wahyu. (2023). Strategi Jepang dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional: Bantuan Luar Negeri Jepang Kepada Indonesia Mengenai Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Enam Pulau Terluat Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Internet

Aryanto, Christ Billy. (2019, 7 Oktober). “Mengapa musik dan yel-yel mampu meningkatkan semangat dalam unjuk rasa damai”. [https://theconversation.com/mengapa-musik-dan-yel-yel-mampu-](https://theconversation.com/mengapa-musik-dan-yel-yel-mampu-meningkatkan-semangat-dalam-unjuk-rasa-damai-124496)

[meningkatkan-semangat-dalam-unjuk-rasa-damai-124496](https://theconversation.com/mengapa-musik-dan-yel-yel-mampu-meningkatkan-semangat-dalam-unjuk-rasa-damai-124496). (Diakses 28 Agustus 2024)

Henwood, Bridgett. (2017, 23 Mei). “The History of American Protest Music, From “Yankee Doodle” to Kendrick Lamar”. <https://www.vox.com/culture/2017/4/12/14462948/protest-music-history-america-trump-beyonce-dylan-misty>. (Diakses 1 Juni 2024)

Hodge, Mikalah. (2023, 10 September). “The Pitches of Protests: How Music Makes Movements”. <https://harvardpolitics.com/pitches-of-protest/>. (Diakses 7 Agustus 2024)

Iwan Fals Musica. (2024). *Kenapa Ambulance Zig-Zag? | Iwan Fals & Band Bersama NonaRia*. https://www.youtube.com/shorts/vmE_ECqNKGU. (Diakses 20 Agustus 2024)

Prahamamsa, I Putu Gede Rama dan Ni Made Tasya Rani. (2022, 21 Oktober). “61 Tahun Iwan Fals: Perjalanan Panjang Manusia Setengah Dewa”. <https://tirto.id/61-tahun-iwan-fals-perjalanan-panjang-manusia-setengah-dewa-gxqo>. (Diakses 29 Agustus 2024)

Salam, Fahri. (2010, 22 April). “Kutu Subversif dalam Rambut Gondrong”. *Historia*. <https://historia.id/kultur/articles/kutu-subversif-dalam-rambut-gondrong-PMGyD>. (Diakses 16 Agustus 2024)

Wiguna, Bangkit Adhi. (2021, 28 November). “Penembak Misterius 1980an Ribuan Korban Jiwa, Petrus Beraksi Pertama di Yogya”. <https://nasional.tempo.co/read/1533491/penembakan-misterius-1980an-ribuan-korban-jiwa-petrus-beraksi-pertama-di-yogya>. (Diakses 28 Agustus 2024)